



Wahab Tuanaya
Nurainy Latuconsina



KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Wahab Tuanaya
Nurainy Latuconsina



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Copyright @2025 Wahab Tuanaya dan Nurainy Latuconsina

All right reserved

Penulis

Wahab Tuanaya
Nurainy Latuconsina

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Prof. Dr. Zainal A. Rengifurwarin, M.Si.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-633-5

Cetakan ke-1, Agustus 2025

17,6 x 25 cm, x + 277 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang berjudul *Kebijakan Pemerintahan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman akademik maupun praktis terhadap dinamika, konsep, dan praktik kebijakan pemerintahan yang semakin kompleks dan menantang di era transformasi digital dan tata kelola modern.

Penulisan buku ini dilandasi oleh kebutuhan akan referensi yang komprehensif dan sistematis mengenai kebijakan pemerintahan. Buku ini tidak hanya menguraikan teori dan konsep dasar, namun juga menghadirkan model, proses, pelaksanaan, evaluasi, hingga tantangan kontekstual dan inovasi kebijakan, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, politik, dan sosial.

Pada Bab I, pembaca diajak memahami konsep dasar dari kebijakan pemerintahan, termasuk pengertian istilah, perbedaan dengan kebijakan publik, serta ruang lingkupnya yang luas dan multidimensional. Bab II mengupas substansi dan berbagai model kebijakan pemerintahan yang mencerminkan pendekatan akademik maupun praktik yang berkembang. Bab III dan IV mengulas proses perumusan hingga pengesahan kebijakan, termasuk dinamika aktor dan faktor yang mempengaruhinya.

Bab V dan VI membahas pelaksanaan serta evaluasi kebijakan secara kritis, termasuk hambatan serta metode evaluasi. Selanjutnya, Bab VII menyajikan dinamika dan tantangan kontemporer kebijakan pemerintahan di Indonesia, mulai dari isu politik hukum, transparansi, hingga digitalisasi. Bab VIII membahas dimensi etika dan nilai, dengan fokus pada dilema kebijakan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Ciri khas buku ini tampak pada Bab IX dan X, yang mengangkat isu-isu strategis dan kekinian, yaitu kebijakan pemerintahan di wilayah kepulauan dan inovasi digital dalam tata kelola. Bab IX menggambarkan kondisi ketimpangan dan

kebutuhan kebijakan afirmatif berbasis desentralisasi asimetris. Sedangkan Bab X membahas konsep smart governance sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas layanan, partisipasi publik, dan transparansi pemerintahan.

Setiap bab dalam buku ini juga dilengkapi dengan *Tugas Latihan* untuk memperkuat pemahaman dan mendorong pemikiran reflektif dari para pembaca, khususnya mahasiswa dan praktisi kebijakan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan ajar, referensi ilmiah, serta sumber inspirasi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang responsif, adil, dan berbasis bukti. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Ambon, Agustus 2025
PENULIS

Wahab Tuanaya
Nurainy Latuconsina

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	1
A. Pengertian Istilah Kebijakan	2
B. Istilah Pemerintahan dan Pengertiannya	6
C. Definisi Kebijakan Pemerintahan	8
D. Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Publik dan Kebijakan Pemerintahan	11
E. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintahan	13
BAB 2 ISI DAN MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	29
A. Substansi/Isi Kebijakan Pemerintahan	30
B. Manfaat Model sebagai Representasi dalam Kebijakan Pemerintahan	47
C. Jenis-Jenis Model Kebijakan Pemerintahan	50
BAB 3 PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	75
A. Perumusan Masalah Kebijakan	76
B. Perumusan Agenda Pemerintah	79
C. Masuknya problem umum ke dalam Agenda Pemerintah	81
BAB 4 PENGESAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	87
A. Perumusan Usulan Kebijakan Pemerintahan	88
B. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Usulan Kebijakan	90
C. Pengesahan Kebijakan Pemerintahan	94
BAB 5 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	101
A. Pengertian Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	102
B. Aktor dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	105

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- (2011). *Public Policymaking* (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Arief dan Patria. Antonio Gramsci : Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015
- Arifin, et. al, 2020, Opini Medialintas kepri, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Anthopoulos, L., & Reddick, C. G. (2016). *Smart city and smart governance: A review*. Government Information Quarterly
- Ambari, M. (2017). Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?. <https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2023). *Survei Internet APJII 2023: Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. <https://apjii.or.id> Ardika Nurfurkon, Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, August 2020, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2: 73-81
- Amirrudin Umasangaji, Ahmad Mufti, Sri Indriyani Umra, 2020, Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020, De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, p-ISSN 2715-9531, e-ISSN 2716-0467

- Ardika Nurfurkon, Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, August 2020, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2: 73-81
- Arsyad, M. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bason, C. (2010). *Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society*. Bristol: Policy Press.
- Bappeda Kota Surabaya. (2020). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan e-Musrenbang Surabaya Tahun 2020*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- BKN (2023). *Laporan Statistik ASN dan Literasi Digital Nasional*. Badan Kepegawaian Negara.
- Bappenas. (2020). *Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kepulauan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Bird, R. & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*.
- Bagong Suyanto, 2013, Sosiologi Ekonomi, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*
- Bryant, coralie dan Louise G White.1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta : LP3ES. Badan Pusat Statistik
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture (Vol. 1) (2nd ed.)*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Caiden, Gerald E. (1982). *Public Administration* Edisi 2. California. Palisades. Publishers. Drucker, Peter. (2018).
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience*. World Development, 22(9), 1253–1268.
- Charles E. Lindblom, Proses Penetapan kebijaksanaan, Edisi Kedua Penerjemah Ardin Syamsudin, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, D. A, 2007, From Government Decentralization to Decentralized Governance dalam Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices diedit oleh Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, D. A, Washington D.C: Brookings Institution Press
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda Building*. Boston: Allyn and Bacon.
- Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Cooper, T. L. (2006). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery. *Government Information Quarterly*
- Darsono, 2019, *Bahan Ajar Kebijakan Pemerintahan* (Untuk Mahasiswa Semester VI,) Prodi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNPATTI.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Denhardt, K. G. (2002). *The Moral Foundations of Public Service*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Debora Stone, (2002). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* (Rev. ed.). W.W. Norton & Company.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Dror, Yehezkel, 1971, *Ventures in Policy Science, Concepts and Application*, (New York, Oxford, Jerusalem: Elsevier)
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- , (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- , (1953). *The political system: An inquiry into the state of political science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Edi Suharto; Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Firman, T. (2007). *New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation*.
- Fitriani, E. (2018). "Menakar Keadilan dalam Desentralisasi Asimetris: Studi pada Daerah Kepulauan." *Jurnal Politik*,
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.
- Fox, J. (2015). *Social accountability: What does the evidence really say?* World Development,
- Finer, Edward, Samuel cs. 1995. *Comparing Constitutions*. T.T. Clandron Press Oxford: Oxford.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. New York: McGraw-Hill.
- Frederickson, H. G. (2005). *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.
- Fung. 2015. "Shakespeare in the Apps: Mobile Technology in Education Context." *International Journal of Information and Education Technology* 6(9):731–36.
- Galih Topati, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). [Opini](#) Lintaskepricom, Urgensi Pemberlakuan Desentralisasi Asimetris bagi Daerah Kepulauan di Indonesia, Desember 2024
- Gerald E. Caiden, "Maladministration Revisited", *International Journal of Civil Service Reform and Practice* Vol 2, No 1 (2017), (Astana: Astana Civil Service Hub, 2017)
- Gil-García, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector : what can be done ? *Public Administration and Development*
- G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices* (hlm. 239–251). Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Healey, P. (1998). *Building Institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban Planning*. *Environment and Planning A*, 30(9), 1531–1546.
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

- Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money & Management*, 25(1), 27–34.
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Heeks, Richard. (1999). Information Systems for Public Sector Management.
- Hoogerwerf. 1997. Ilmu Pemerintahan, Cetakan pertama. Jakarta : Erlangga
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). "Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management." *Administration & Society*, 47(6), 711–739.
- Hidayat, F., & Sutisna, S. (2014). Uji Geospasial Provinsi Kepulauan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Geospatial Test of Archipelagic Province in Indonesia After the Enactment of. 20(2), 135–148. Badan Informasi Geospasial. Cibinong.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Hood, C. (2007). What Happens When Transparency Meets Blame-Avoidance? *Public Management Review*
- Ismail, F. (2020). "Konsep Equity dalam Otonomi Daerah Asimetris: Refleksi Keadilan dalam Sistem Pemerintahan Lokal." *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 190–206.
- Institut Otonomi Daerah (I-Otda). (2021). *Kajian Kebutuhan Regulasi untuk Penguatan Daerah Kepulauan*. Jakarta: I-Otda.
- Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1984.
- , Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul 1-9 UT, Jakarta, 1999.
- Janssen, M., & Kuk, G. (2016). *The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance. Government Information Quarterly*
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3)
- Jenkins, W. I. (1983). *Policy Analysis: A Political and Organisational Perspective*. London: Martin Robertson.
- Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy* (3rd ed.). Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Oakland: University of California Press.
- Katorobo, J. (2007). Decentralization and the Challenge of Democratic Governance.
- Kementerian PANRB. (2021). *Panduan SP4N-LAPOR! Nasional: Strategi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*. <https://www.lapor.go.id>

- Kementerian Kominfo. (2022). Evaluasi Program Palapa Ring dan Internet Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Kitchin, R. (2014). The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences. *SAGE Publications*.
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A framework for political inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- LAN (2022). *Peta Jalan Transformasi ASN Digital Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). (2020). *Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal untuk Wilayah Kepulauan*. Jakarta: LIPI Press.
- Madubun Jusuf, 2024 Desentralisasi Pelayanan Publik, *Menelisik model pelayanan public di daerah kepulauan*, Budhi Mulia, Sukabumi
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank.
- Martinez-Vazquez, J., & Smoke, P. (2010). *Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century*.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The Second Wave of Digital-era Governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*
- Mauro, Paulo. 1995. "Corruption and Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 110 (3): 681–712.
- McRae, Duncan Jr. dan Wilde, A. (1985). *Policy Analysis for Public Decisions*. Boston: University Press of America, Inc.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-Blowing in Organizations*. New York: Routledge.
- Meijer, A. (2014). Transparency. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability* (pp. 507–525). Oxford: Oxford University Press.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open Government: Connecting Vision and Voice. *International Review of Administrative Sciences*
- Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, 1984.

- M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Nam, T. (2011). *Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context*. Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance
- Nicholas Henry, 1998, Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan, Terjemahan Luciana, Rajawali Pers, Jakarta I/Puslit/Juli/2017
- Nigro & Nigro, (1991). *Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta : A Handbook for Public Administration*,
- Norris, Pippa. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhadi, M., & Suwondo, W. (2017). "Desentralisasi dan Keterpencilan Wilayah Kepulauan: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah di Kepulauan Sula dan Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 22–38.
- Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijakan Negara, Liberty Yogyakarta, 1989.
- OECD. (2020). *Government at a Glance*. OECD Publishing, Paris.
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2011). *Innovation, public policy and public services delivery in the UK: The word that would be king?* In S. P. Osborne (Ed.), *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance* (pp. 409–428). London: Routledge.
- Pamudji, S. 1985. "Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah : Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara". Jakarta : Bina Aksara.
- Pardede, Fedro Antonius, H.L.H Spits Warnars, 2010, Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis Untuk Menunjang Pembangunan Daerah, National seminar University of Budi Luhur 2009, University of Budi Luhur, Jakarta.
- Parker, L. D., Schmitz, J., & Jacobs, K. (2019). Auditor and auditee engagement with public sector performance audit. An institutional logics perspective.
- Patton, C., & Sawicki, D. S. (1993). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Dokumen Implementasi e-Budgeting dan Transparansi Anggaran DKI Jakarta*. Jakarta Smart City Unit.
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Piotrowski, S. J. (2007). Governmental transparency in the path of administrative reform. *SUNY Press*.

- Prasojo, Eko. (2010). *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: UI Press.
- Rahmawati, D. (2019). "Multiple Marginalities dalam Wilayah Kepulauan: Tantangan Tata Kelola Daerah di Indonesia Timur." *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 71–85.
- Raksasataya, A. (2015). Foreign Aid to Administration in Thailand.
- Ratnawati, L. (2006). Devolusi Asimetris dalam Sistem Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 389–400.
- Rengifurwarin Z. A. & Tuanaya W, 2023, *Clean and Good Governance* Dalam Pelayanan Publik, Tantangan Daerah Kepulauan Saat Pandemi Covid 19 menuju adaptasi kebiasaan baru, Bab III Book Chapter, Membangun Maluku, Universitas Pattimura Press
- Robert Dahl, 1989, "Demokrasi dan Kritikusny," New Haven, Yale University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. *Political Studies*
- Romzek, Barbara S. dan Melvin J. Dubnick. 1987. Accountability in Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, Vol. 47
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rossi Peter H. and Freeman Howard E., 1993, *Evaluation : a systematic approach*, Perpustakaan UI,
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sanderson, I. (2002). Evaluation, policy learning and evidence-based policy making. *Public Administration*,
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saksono, H., 2013, Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Sekretariat Satu Data Indonesia. (2023). *Portal Satu Data Indonesia*. <https://data.go.id>
- Suprpto, A. (2021). *Desentralisasi Kontekstual: Pendekatan Pemerintahan Wilayah Kepulauan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Simatupang, B., & Akib, H. (2011). Desentralisasi Asimetris: Pendekatan Keadilan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*
- S. A. Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, 1989

- Smoke, P. (2003). *Decentralisation in Africa: Goals, Dimensions, Myths and Challenges*. Public Administration and Development, 23(1), 7–16.
- Susila Wibawa, Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, *Administratif Law And Government Jurnal*, Vol 2, No 3 (2019), e-ISSN 2621-2781
- Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP). Jakarta.
- Stepan, A. (1999). *Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model*.
- Tarigan, R. (2014). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarlton, C. D. (1965). Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation. *The Journal of Politics*
- Tauda, G. A., 2019, Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*
- Turner And Hulme, 1997, *Governance, Administration And Development : Making The State Work*, London, Macmilan Press,
- Transparency. (2020). *Corruption Perception Index 2020*. Berlin: Transparency International.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Tjahjono, A. (2020). "Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Daerah Kepulauan: Potensi dan Tantangan." *Jurnal Administrasi Negara*,
- Utomo, D. (2009). *Desentralisasi Asimetris dan Konsolidasi Demokrasi di Negara Kesatuan*. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP Indonesia. (2019). *Pelayanan Terpadu Keliling di Maluku: Studi Evaluatif*. Jakarta: United Nations Development Programme.
- Watts, R. L. (2005). *A Comparative Perspective on Asymmetry in Federations*. Kingston, Ontario: Institute of Intergovernmental Relations, Queen's University.
- Winarno, B. (2021). *Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Era Digital: Studi Kasus Kota Surabaya dan Banyuwangi*. *Jurnal Administrasi Publik*
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*,

- Veljanovski, C. (2010). *Asymmetrical Decentralization: A Model for Multiethnic Societies*. Policy Paper. London: Centre for Policy Studies.
- Y. T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Edisi 2, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2008.
- Young, Iris Marion (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Walker, B., et al. (2001). Resilience Management in Social-ecological Systems. *Conservation Ecology*.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). New York: Oxford University Press. (Original work published in 1922)
- Weimer David L. dan Vining, Aidan R., 1999, Policy Analysis: Concepts and Practice, cet ketiga, Prentice Hall, New Jersey,
- Wildavsky, A. (1979). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown and Company.
- World Bank. (2020). *Indonesia: Local Governance and Decentralization Review*. Washington D.C.: The World Bank Group.
- World Bank. (2018). *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster*. World Bank Group.
- World Bank. (2021). *Digital Transformation for Inclusive Growth in Developing Economies*. World Bank Report.

PROFIL PENULIS



Wahab Tuanaya

Staf Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Pattimura Ambon

Penulis dilahirkan di Ambon, 14 Desember 1996. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon, S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan menyelesaikan Doktor pada Universitas Negeri Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Buku yang pernah dihasilkan Politik Anggaran ; Dinamika Komunikasi Politik antara Legislasi dan Eksekutif dalam APBD, Suksesi Kepemimpinan Adat di Negeri Raja-Raja, Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, Kepemimpinan Pemerintahan dan mengambil bagian dalam Book Chapter Membangun Maluku bersama Tim dari Universitas Pattimura.



Nurainy Latuconsina

Staf Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Pattimura Ambon

Penulis dilahirkan di Kota Ambon, 8 Juli 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Ambon. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung. Penulis bersama Tim dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPATTI merampungkan buku berjudul Suksesi Kepemimpinan Adat Di Negeri Raja-Raja. Penulis dapat dihubungi melalui email : nurainy.latuconsina123@gmail.com atau nomor telepon 085243000428